

BAB III

INTEGRASI NAWACITA DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Joko Widodo mengusung agenda pembangunan nasional yang disebut dengan 'Nawa Cita'. Nawa Cita sendiri terdiri dari sembilan prioritas pembangunan. Nawa cita kemudian diterjemahkan kedalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diluncurkan pada 8 Januari 2015. Dokumen RPJMN ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, dan Agenda Pembangunan Wilayah. Hampir setahun kemudian pada tanggal 25 September 2014 mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030 Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). (UNDP, 2015)

Dari penjelasan diatas, ditambahkan pernyataan oleh wakil presiden Jusuf Kalla bahwasanya Indonesia mengimplementasikan agenda pembangunan global yakni SDGs kedalam rencana pembangunan nasional, hal ini mengingat bahwa SDGs dan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN memiliki tujuan yang relevan dan integrasi SDGs

kedalam rencana pembangunan nasional merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam merealisasikan agenda SDGs di Indonesia sehingga pelaksanaan SDGs dapat terlaksana dengan baik ditingkatan nasional dan daerah.

A. Nawacita

Nawacita atau sembilan agenda prioritas adalah sebuah gagasan yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai agenda perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan . Nawacita sendiri merupakan refleksi konsep Trisakti yang digagas oleh Soekarno, hal tersebut didasari bahwa konsep Trisakti masih relevan dengan kondisi diIndonesia saat ini. (Saragih, 2015) Trisakti yang diaktualisasikan kembali oleh presiden Joko Widodo dalam Nawacita sebagai solusi atas berbagai problematika yang dihadapi masyarakat dan diharapkan dapat mengembalikan kondisi bangsa agar dipandang sejajar oleh dunia. Bersama Pancasila, Trisakti menjadi dasar ideologi yang melandasi lahirnya Nawacita. (Kumolo, 2017)

Dalam konteks ekonomi politik global, Nawacita merupakan visi pembangunan yang dibangun ketika negara-negara didunia mengalami fase saling ketergantungan dengan negara lainnya. Dalam situasi ekonomi politik dunia yang didominasi oleh negara-negara maju dalam mempengaruhi negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia maka kaitannya dengan Nawacita bahwa nawacita menawarkan visi pembangunan yang dapat membuat ekonomi menjadi mandiri, berbudaya dan berdaulat secara politik

Nawacita juga mengkritisi model-model pembangunan yang diperkenalkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Model pembangunan yang dimaksud adalah model pembangunan berbasis pasar dan konsep diplomasi pembangunan. Yang mana program-program tersebut menciptakan berbagai program liberalisasi dan privatisasi serta konsep penguasaan atas mekanisme yang kaitannya dengan bantuan ekonomi dan pinjaman-pinjaman ataupun hibah yang diatur oleh faktor-faktor non ekonomi. (Masoed, 2008)

Pembangunan yang berbasis pasar tidak saja cukup dalam menopang pembangunan dikarenakan pertama, pembangunan dan industrialisasi yang ditopang oleh negara atau apa yang disebut sebagai *market governed* dan tidak semata-mata mendasarkan pada bekerjanya pasar. Kedua, pembangunan dengan mekanisme pasar gagal dalam meraih tujuan pembangunan yang diharapkan bahkan pembangunan yang semata-mata bersandarkan pada kerjanya pasar telah menghasilkan dampak-dampak buruk dalam bentuk kemiskinan dan ketimpangan. Dengan begitu pasar tidak dapat menggerakkan pembangunan dan harus diimbangi oleh peran negara. (Winarno, 2013)

Oleh karena itu Nawacita pada konteks ini memberikan penguatan pada negara terutama dalam hal pembangunan, agar pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunana yang berorientasi pasar dan menjadi pembangunan dengan pola ketergantungan yang parah namun dengan nawacita ini pembangunan di Indonesia dapat mandiri seperti sesuai dengan poin-poin pada Nawacita dan juga Trisakti.

Pada konteks ekonomi politik nasional Nawacita sendiri lahir berdasarkan tiga pokok permasalahan bangsa saat ini, yakni Merosotnya

kewibawaan bangsa, Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan Merebaknya Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ketiga permasalahan pokok diatas diuraikan oleh presiden Jokowi sebagai masalah penting yang mesti diselesaikan oleh bangsa Indonesia melalui jalan perubahan, dan hal tersebut kembali dirinci oleh presiden Joko Widodo melalui program yang lebih terarah bernama Nawacita. Nawacita bermakna sembilan cita-cita pembangunan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. (Kumolo, 2017)

Nawacita sendiri memiliki 9 agenda pembangunan tujuan-tujuannya diantaranya adalah : Menghadirkan kembali negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, membangun dari pinggiran dan memperkuat desa-desa, penegakan hukum yang anti korupsi bermertabat dan tepercaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing baik tingkat nasional maupun global, menggerakkan ekonomi yang inklusif dengan fokus pada pembangunan ekonomi domestik, melakukan revolusi mental dan mempergah kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan melihat aspek ekonomi politik baik global maupun nasional fokus pembangunan nawacita difokuskan kepada pembangunan-pembangunan inklusif yang menempatkan kemandirian secara ekonomi, pembangunan manusia dan budaya serta berdaulat secara politik.

Nawa cita pada kemandirian ekonomi Indonesia oleh presiden Joko Widodo diperkuat dengan cara menggerakkan ekonomi kerakyatan,

memberikan perhatian pada produk-produk Indonesia, serta mendorong *land-reform*. Serta mengurangi kesenjangan pembangunan lewat pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah, pembangunan konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan jalur darat, laut dan udara agar tercipta kemandirian daerah yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi bangsa dan negara. (Soleman dan Noer, 2017) Serta menyiapkan infrastruktur-infrastruktur didaerah pinggiran ataupun perbatasan agar mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing nasional dan internasional.

Adapun dalam bidang politik. Nawacita mendorong terciptanya negara yang kuat, hadir melalui reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim, serta senantiasa membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam strategi kebudayaan, Nawa cita secara kebudayaan mendorong bahwasanya kebudayaan di Indonesia dibentuk berdasarkan kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari desa/daerah kemudian bersatu menjadi bangsa Indonesia. (Kumolo, 2017) Kebhinekaan sebagai wujud penghargaan terhadap multikulturisme dan keberagaman suku, agama dan ras dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kekuatan budaya bangsa dalam menjaga keberagaman, harmoni dan kesetaraan saling menghormati antar umat beragama di Indonesia untuk memperkuat kepribadian budaya bangsa. (Soleman dan Noer, 2017)

Terakhir Nawa Cita dalam Pembangunan nasional sebagai pembangunan mental bangsa dimulai dari membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing, memiliki kecerdasan, memiliki etos kerja tinggi, berintegritas tinggi dan gotong royong sebagai semangat pluralisme untuk membangun bangsa yang

di terjemahkan sebagai paradigma revolusi mental untuk mendorong mentalitas bangsa agar dapat menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa.

Dengan penjelasan-penjelasan diatas, dalam menanggapi isu-isu pembangunan global, Nawacita erat kaitannya dengan tujuan-tujuan ataupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan tujuan-tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep nawacita juga telah memberikan arahan agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara holistik. Pembangunan berkelanjutan merupakan ruh dari visi nawacita yang melaksanakan pembangunan yang pro NKRI, pro lingkungan, pro rakyat miskin, pro kesetaraan gender dan pembangunan yang anti KKN. (Abdoellah, 2016)

B. Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Agenda Pembangunan Global

Menjelang berakhirnya program MDGs pada tahun 2015 para pemimpin-pemimpin dunia mengadakan sebuah konferensi di Rio de Janeiro yang dikenal dengan Rio+20 summit pada tahun 2012 untuk membahas kelanjutan dari program MDGs . Dari hasil pertemuan tersebut KTT Rio+20 menyepakati dokumen berjudul *The Future We Want*. Dokumen ini menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditingkat global, regional dan nasional. Dokumen tersebut memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan pembangunan oleh dunia dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga memperkuat penerapan *Rio Declaration 1992* dan *Johannesburg plan of implementation 2002* terkait permasalahan pembangunan dan lingkungan. Dalam dokumen *The*

Future we want, terdapat 3 isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) *Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*, (2) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*institutional framework for sustainable development*) serta (3) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*framework for action and means of implementation*). Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan *Sustainable Development Goals (SDGs) post 2015* yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan secara inklusif. (Kartakusuma, 2012)

Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintah dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen yang berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

Istilah SDGs diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDGs diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan melanjutkan agenda pembangunan MDGs dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat dan kompleks, seperti masalah perubahan iklim. SDGs juga menjadi suatu agenda transformasi yang membentuk kembali perkembangan

global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Sebagaimana hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio+20) yang telah menegaskan bahwa semua komunitas internasional harus melakukan pembangunan global dengan cara dimana semua negara harus bertanggungjawab atas kesejahteraan ataupun keberlangsungan manusia dan planet. (Nations, 2015)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting dalam pelaksanaan SDGs, konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dari lahirnya agenda-agenda pembangunan ke depan seperti SDGs dan MDGs. Pembangunan Berkelanjutan juga merujuk pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian pembangunan ini mengandung dua unsur utama yakni konsep tentang kebutuhan, khususnya kebutuhan yang esensial seperti rumah, fasilitas infrastruktur dan energi bagi orang di dunia serta konsep tentang keterbasan, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini selain untuk kebutuhan di masa depan. Yang disebut berkelanjutan adalah lemahnya memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang diinginkan namun menegaskan bahwa pertumbuhan harus di batasi untuk memastikan dampak ekologis tidak mengancam keberlanjutan jangka panjang (Heywood, 2016,) oleh karena itu pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah pilar untuk melakukan pembangunan kerana melihat dari beberapa aspek.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya bersama dalam membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk masyarakat dan planet. Agar pembangunan tersebut dapat tercapai,

maka formula yang disusun haruslah menyelaraskan tiga elemen inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan global, diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan merata; mengurangi ketidakesetaraan; meningkatkan standar kehidupan dasar; mendorong pengembangan sosial yang inklusif dan setara; dan mempromosikan pengelolaan sumber daya dan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan serta melindungi sumberdaya alam dan ekosistem yang sering dieksploitasi dan dirusak ketika pembangunan berlangsung. (Matthew dan Hammill,2009) Namun menurut beberapa pengamat mengatakan bahwa konsepsi dari pembangunan berkelanjutan tidak nyata menjadi pilar sesungguhnya dari pembangunan global, khususnya di dunia ketiga. Pembangunan berkelanjutan masih hidup pada taraf retorika yang tidak hanya menjadi alat untuk di manfaatkan dan membenarkan kebijakan-kebijakan sepihak yang ditekankan negara-negara dunia pertama kepada pemerintah negara-negara dunia ketiga dalam konteks penguatan akses ekonomi (Attfield,1999;dalam Abdoellah 2016, hal. 34)

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitas maupun kuantitatif yang menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sarasannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju,negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk kontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara

satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.berbeda dengan MDGs, MDGs hanya memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. (Panuluh dan Fitri,2016). Berikut perbedaan antara MDGs dan SDGs dapat dilihat tabel 3.1

Tabel 3.1 Perbedaan MDGs dan SDGs

| MDGs 2000- 2015 | SDGs 2015-2030 |
|---|--|
| <p>Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p> | <p>Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri kemiskinan • 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran • memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh. |
| <p>Dari negara maju, untuk negara Berkembang</p> <p>MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p> | <p>Berlaku universal</p> <p>SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p> |
| <p>Dari Atas (<i>top down</i>)</p> <p>Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau</p> | <p>Dari Bawah (<i>bottom up</i>) dan partisipatif</p> <p>Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara</p> |

| | |
|--|--|
| pertemuan dan survei warga. | dan survei warga. |
| Solusi parsial atau tambal sulam | Solusi yang menyeluruh |
| 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan | Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender • Tata pemerintahan • Perubahan model konsumsi dan produksi • Perubahan sistem perpajakan • Diakuinya masalah ketimpangan • Diakuinya masalah perkotaan |

Sumber : Diadaptasi dari Dr. John Coonrod, dalam Kern Beare, www.feelgood.org.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu 1. People (manusia), 2. Planet (bumi) 3. Prosperity (kemakmuran) 4. Peace (Kedamaian) 5. Partnership (Kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 tujuan dan 168 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. (Nations, 2015)

Dengan 5 prinsip dasar dan 168 sasaran maka 17 tujuan tersebut diantaranya yaitu :

1. Tanpa kemiskinan, Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2. Tanpa kelaparan, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, Menjamin hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia;
4. Pendidikan berkualitas, Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang layak dan produktif dan layak untuk semua;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur yang kuat, menggalakkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

10. Berkurangnya kesenjangan, Mengurangi ketidaksamaan dalam negara dan di antara negara- negara;
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, Membuat kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah mendesak untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
14. Ekosistem lautan, Melindungi dan menggunakan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Ekosistem daratan, Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem darat (terrestrial), pengelolaan hutan- hutan yang berkelanjutan, melawan penggurunan, dan menghentikan dan merehabilitasi degradasi lahan serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi- institusi yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan;

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. memperkuat cara implemenstasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan. (Nations, 2015)

Berbagai dukungan terkait pelaksanaan agenda pembangunan banyak dikemukakan oleh berbagai pihak. Mereka meyakini bahwa SDGs mampu mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dengan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Antonio Guterres sekretaris jendral PBB periode 2017-2021 mendukung penuh pelaksanaan SDGs yang telah menguraikan secara universal, mengintegrasikan dan mentransformasikan cita-cita dunia menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. (Hammill, 2009). Agenda tersebut menjadi sebuah pijakan dari sebuah agenda pembangunan baru yang dapat menata dunia ke dalam sebuah aksi untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan bumi dan planet. Tujuan-tujuan tersebut menjelaskan SDGs melibatkan negara-negara unuk saling berkerja sama dalam mempromosikan martabat, kesejahteraan , keadilan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan agi semua orang serta melindungi lingkungan. (Pedersen, 2015)

Mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan SDGs merupakan tanggungjawab semua negara dan masyarakat dalam mendukung agenda tersebut. Partisipasi publik yang lebih luas dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Sebab jika tidak adanya partisipasi publik maka agenda SDGs akan sama dengan MDGs. Menurut Sugeng direktur Infid bentuk partisipasi publik tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk organisasi bersama

dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dengan hal seperti ini maka pemerintah dengan mudah melakukan pemetaan masalah dilapangan, membuat solusi dan melakukan monitoring serta evaluasi. Ditambahkan lagi oleh Kate Donald, *Director at Center for Economic and Sosial Right*, faktor kunci keberhasilan SDGs nanti adalah akuntabilitas yang menekankan pada sistem pelaporan yang independen dan transparan (Destrianita, 2015)

Kombinasi ketiga dimensi yakni, sosial, ekonomi dan lingkungan diharapkan mampu menciptakan sebuah agena pembangunan yang mampu menyejahterakan masyarakat dan planet secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat, banyaknya tujuan yang akan dicapai dalam SDGs diperlukan biaya dan dukungan yang besar baik untuk negara maju dan berkembang. Agenda ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar, khususnya dalam hal pembiayaan mengingat banyaknya tujuan yang akan diwujudkan dalam waktu 15 tahun. (Nations, 2015)

Indonesia dalam hal ini menegaskan komitmen pelaksanaan SDGs melalui pengintegrasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 agar tujuan SDGs bisa diimplementasikan pada tingkatan pusat dan daerah. Hal ini juga sebagai evaluasi pelaksanaan MDGs di Indonesia yang baru dapat berjalan 10 tahun dari masa awalnya MDGs dirumuskan sehingga banyak target dari MDGs tidak tercapai dengan baik. Indonesia sendiri meyakini bahwa pelaksanaan SDGs yang terintegrasi dengan RPJMN akan mewujudkan pencapaian tujuan SDGs yang maksimal.

C. Integrasi Nawa Cita dan SDGs dalam Program Pembangunan Nasional dan Daerah

Komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dimulai dari presiden-presiden sebelumnya. Komitmen tersebut ditandai dengan Komitmen pemerintah melanjutkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta program-program pemerintah lainnya. Program-program tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta lingkungan serta pemeliharaan daya dukung guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. (Abdoellah, 2016)

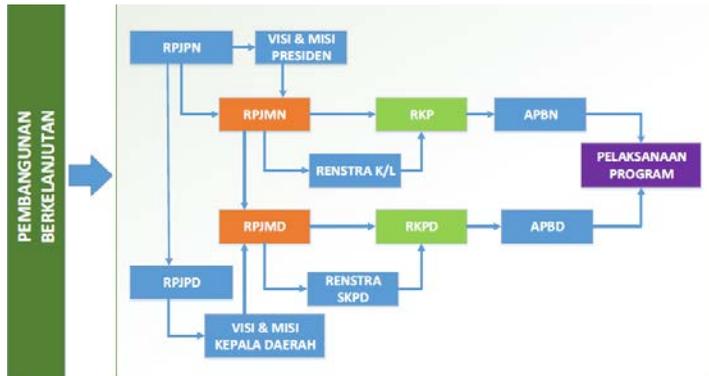
Pada tahun 2015 Indonesia yang diwakili oleh wakil presiden Jusuf Kalla menandatangani kesepakatan SDGs dan menyampaikan bahwa poin-poin SDGs dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Indonesia memiliki prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta Nawa Cita menjadi arah dalam agenda pembangunan nasional dan sedangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu TPB/SDGs menjadi bagian dalam acuan pembangunan nasional dan daerah. (BAPPENAS,2017)

Terdapat konvergensi ataupun kesamaan Poin-poin yang berada dalam SDGs dan Nawacita. Dalam hal pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi dan konservasi keduanya dapat sejalan selaras. Oleh karena itu Nawa Cita dan SDGs dapat diintegrasikan kedalam Rencana

Pembangunan Nasional. selain itu dalam pendekatan yang inklusif, keterlibatan masyarakat internasional, berbagai jenis kegiatan teknis yang menopangnya dapat membawa banyak hal ke dalam agenda nasional. hal ini termasuk perpektif dan pendekatan kebijakan baru yang melibatkan masyarakat, sektor swasta dan organisasi pengabdian, serta yang menjadi perhatian adalah pengintegrasian agenda global dan nasional diperlukan pendanaan hingga perencanaan yang matang. (UNDP, 2015)

Dalam perencanaan pembangunan tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka 5 tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementarian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. (BAPPENAS, 2017) Berikut gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dapat dilihat dalam gambar 3.1:

Gambar 3.1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

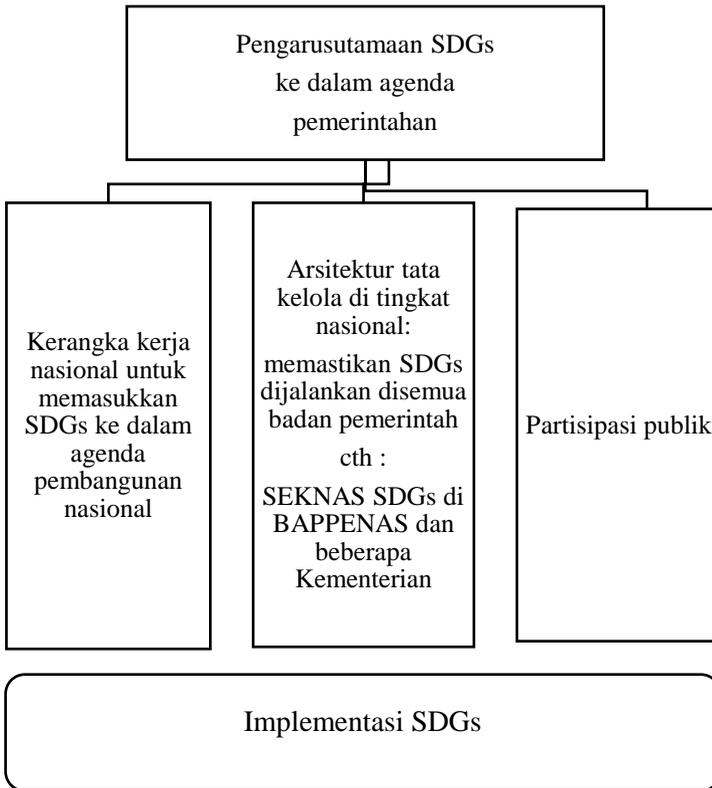


Sumber : BAPPENAS, 2017

Dari gambar diatas, dapat dilihat bagaimana integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Daerah dan diterjemahkan oleh setiap kepala negara dan kepala daerah melalui visi dan misinya, kemudian dari terjemahan visi misi oleh kepala negara atau kepala daerah maka dijadikan sebuah rencana pembangunan nasional ataupun daerah, dari hasil RPJMN/RPJMD maka dibuat sebuah Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari dana APBN dan APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.

Pada pengarusutamaan SDGs dari agenda global menjadi nasional terdapat 3 pilar utama, berikut gambaran ketiga pilar utama tersebut dalam Bagan 3.1 (Ginting, 2016):

Bagan 3.1 Pengarusutamaan SDGs ke dalam Agenda Pemerintahan



Ketiga pilar pengarusutamaan ke dalam agenda pemerintah, terdiri dari pertama, kerangka kerja nasional untuk memasukkan SDGs ke dalam

agenda pembangunan nasional, maksud dari pilar pertama ini adalah membuat sebuah pedoman kerangka kerja dan mengintegrasikan dalam agenda pembangunan nasional. sehingga dalam membuat sebuah kebijakan sudah terintegrasi dalam agenda SDGs. Kedua, dalam pilar ini adalah membentuk sebuah lembaga atau tata kelola ditingkat nasional agar memastikan SDGs dijalankan disemua badan pemerintah dan fungsi lembaga ini juga sebagai monitoring dan pengarah dalam setiap kebijakan yang bersinggungan dengan poin-poin SDGs. Dan pilar ketiga, adalah partisipasi publik, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan diperlukan partisipasi publik seperti LSM, Organisasi filantropis, akademisi dan praktisi agar implementasi SDGs dapat dirasakan secara universal oleh seluruh golongan masyarakat. Inilah 3 pilar pengarusutamaan ke dalam agenda pemerintah yang mana dalam ketiganya bertujuan agar Implementasi SDGs dalam agenda pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Siprianus Bate Soro, Head of Government Unit UNDP mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang menjadikan SDGs sebagai salah satu fokus pembangunan Nasional. Indonesia merupakan salah satu negara pertama di Asia Pasifik yang menerjemahkan tujuan pembangunan perubahan itu kedalam RPJMN. Dari 241 indikator SDGs, 87 masuk dalam RPJMN (AR, 2017)

D. Kesesuaian Target SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional jangka menengah telah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun RPJMN disusun tahun 2014 namun banyak dari target SDGs sudah tercakup dalam prioritas

pembangunan nasional. dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 96 target telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Prioritas Nasional dan Target RPJMN Sesuai Dengan Target SDGs

| Pilar / Goal SDGs | Target Global | Target RPJMN 2014-2019 | Prioritas Nasional |
|-----------------------|---------------|------------------------|--|
| Ekonomi (7,8,9,10,17) | 54 | 30 | <ul style="list-style-type: none"> - Kedaulatan Energi - Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja - Membangun Konektivitas Nasional - Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah - Pelaksanaan Politik LN bebas aktif |
| Sosial (1,2,3,4,5) | 47 | 27 | <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Peningkatan Kedaulatan Pangan - Pelaksanaan |

| | | | |
|-------------------------------|----|----|--|
| | | | <p>Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal |
| Lingkungan (6,11,12,13,14,15) | 56 | 31 | <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Air - Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman - Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi iklim dan Kebencanaan serta Pengurangan Emisi Karbon - Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan - Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana - Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia |

| | | | |
|----------------------------------|-----|----|--|
| Hukum dan Tata Kelola (16) | 12 | 8 | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI - Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan - Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. |
| Total | 169 | 96 | |

Sumber : Sekretariat SDGs Nasional 2015

Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, pilar ekonomi mencakup tujuan 7,8,9,10 dan 17 dengan 54 target dari poin SDGs sedangkan dalam agenda nasional sebanyak 30 target telah sejalan dengan agenda prioritas nasional. Di pilar sosial mencakup 5 tujuan yakni 1,2,3,4 dan 5 dengan 27 target dari poin SDGs sedangkan dalam agenda nasional hanya sebanyak 27 target yang selaras dengan RPJMN. Untuk pilar lingkungan mencakup tujuan 6,11,12,13,14 dan 15 dengan 56 target dan sebanyak 31 target yang diakomodasikan dalam agenda pembangunan nasional. selanjutnya pada pilar hukum dan tatakelola dengan 1 tujuan yakni tujuan 16 dengan memuat 12 target, sebanyak 8 target SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. (BPS, 2017)

Selain itu program Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi sudah dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Dari 9 agenda Nawacita, semua agenda telah selaras dengan 17 tujuan/goal yang ada di SDGs. Dengan demikian agenda Nawacita

pemerintahan Jokowi mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa sejumlah goal atau tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program Nawacita yang berbeda

Tabel 3.3 Kesesuaian Nawacita dan Poin SDGs

| Agenda Nasional (Nawacita) | SDGs |
|---|--------------------|
| Nawacita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | Goal 3, 10, 16, 17 |
| Nawacita 2 Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | Goal 16 |
| Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan | Goal 1-11 |
| Nawacita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. | Goal 16 |
| Nawacita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia | Goal 1-6 |
| Nawacita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. | Goal 1-10 |

| | |
|---|------------------------|
| Nawacita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. | Goal 1-5,8,9 dan 12-15 |
| Nawacita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa | Goal 3,4 dan 11 |
| Nawacita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | Goal 5,10,16,17 |

Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, baik SDGs dan Nawacita berjalan selaras. Dalam hal pembangunan ekonomi juga menunjukan bahwa SDGs dan Nawacita juga sejalan. Namun dilain sisi yakni dalam hal keberlanjutan, ekologi, konservasi dan lingkungan hidup Nawacita yang tertuang dalam RPJMN harus banyak melakukan penyesuaian dikarenakan Nawacita dan SDGs pada pembangunan ini belum banyak selaras terutama pada penyesuaian konsumsi, produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air laut dan sebagainya.

Meskipun dalam bidang lingkungan masih kurang, secara keseluruhan terdapat beberapa fokus SDGs yang menjadi panduan pembangunan serta hal ini sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, diantaranya, Keberlanjutan agenda Pembangunan Manusia. Peningkatan Kesejahteraan dan pendidikan Pembangunan ekonomi berkelanjutan Akses energi yang terjangkau. Keselarasan SDGs dengan visi presiden Joko Widodo atau Nawacita dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2014-2019 sekaligus menjadi pelengkap prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan yang

berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim. (Hoelman, 2015)